BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam era reformasi sekarang ini, informasi mempunyai peranan yang penting bagi kita semua, khususnya bagi instansi pemerintahan. Informasi bagi instansi pemerintah begitu penting, karena informasi tersebut berguna sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien dengan masyarakat. Dengan adanya informasi, akan tercipta suatu keterbukaan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Salah satu informasi utama yang dapat dibuat instansi pemerintahan yaitu informasi mengenai laporan keuangan. Dengan penyajian Laporan keuangan yang telah dibuat oleh instansi pemerintahan secara utuh, akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik. Bentuk laporan keuangan yang telah dibuat oleh instansi pemerintahan ini terdiri dari LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Diantara seluruh bentuk laporan keuangan yang telah disebutkan tadi, salah satu bentuk laporan keuangan yang paling penting yaitu neraca.

Sejak diberlakukannya SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 24 Tahun 2005, seluruh pemerintah kota atau daerah, provinsi ataupun pusat diwajibkan membuat laporan keuangan. Untuk memperkuat SAP tersebut, maka dibuatlah Permendagri (Peraturan Mentri Dalam Negeri) Nomor 13 Tahun 2006 mengenai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diatur proses akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan

keuangan akhir tahun dan tahun berikutnya. Proses ini dirancang sedemikian, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan neraca yang merupakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.

Laporan neraca merupakan laporan yang menyajikan seluruh posisi keuangan pemerintah mengenai kewajiban, asset, dan juga ekuitas dana. Laporan neraca bagi instansi pemerintah dapat memberikan manfaat seperti, meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, memberikan penilaian mengenai posisi keuangan dengan menujukan seluruh sumber daya dan juga kewajiban serta meningkatkan akuntabilitas untuk seluruh kepala daerah dan seluruh pejabat pemerintah daerah ketika mereka bertanggungjawab pada kas masuk, kas keluar, asset, dan juga utang yang mereka kelola.

Dengan adanya laporan neraca ini, instansi pemerintah dapat mengetahui seluruh asset yang dimiliki, sehingga masyarakat pun dapat menilai bahwa uang rakyat yang telah dipergunakan untuk belanja Negara ataupun daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan, benar, dan selaras dengan asset yang diperoleh.

Walaupun laporan neraca memiliki manfaat yang cukup penting bagi instansi pemerintahan, tetapi tetap saja didalam penyusunan neraca pemerintah daerah sering kali menemukan masalah-masalah yang muncul didalam pembuatan, penyusunan, maupun pelaporannya seperti, *pertama*, penyusunan neraca pada instansi pemerintah daerah tidak disusun berdasarkan siklus akuntansi, melainkan melihat langsung berdasarkan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang telah ada. Hal ini yang menyebabkan sering kali pemerintah daerah menemukan ketidaksesuaian antara laporan yang satu dengan yang lain. *Kedua,* penilaian

assetnya masih terus diidentifikasi, karena pemerintah daerah hanya menyusun laporan keuangan apa adanya saja tanpa melakukan pemeriksaan kembali, yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak relevan. *Ketiga*, pemerintah daerah pun sering kali menggunakan sewa guna usaha untuk mendanai pembelian aktiva melalui pinjaman, tetapi pemerintah daerah tidak memuat utang tersebut didalam neraca. Keempat, penyusunan neraca pada pemerintah daerah sering kali tidak diidentifikasi dan dilaporkan semua unsur neracanya dengan secara yang sama. Contohnya klasifikasi judul dan akun yang beragam; SKPD yang menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah memberikan rincian yang lebih banyak, pemerintah daerah yang menyusun laporan dengan transaksi yang sama melaporkannya kepada DPRD secara berbeda. Perbedaan inilah yang membuat perbandingan didalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sulit dan mengurangi nilai potensial analisis neraca.

Oleh karena itu, dengan sering kali ditemukan permasalah didalam laporan neraca, pemerintah daerah perlu mengetahui kualitas asset yang dimiliki. Demikian juga dengan kewajiban, pemerintah perlu mengetahui berapa sebenarnya kewajiban yang akan jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Dari semuanya itu, pemerintah dapat mengetahui apakah ekuitas dana yang dimiliki cenderung meningkat atau mungkin menurun setiap tahunnya,maka pemerintah daerah perlu melakukan pengecekan kembali didalam laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut ke dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul :

“Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat.”

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan adalah untuk mengumpulkan data serta informasi tentang prosedur penyusunan laporan neraca pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang hendak dicapai dengan mengadakan kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam laporan neraca pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai prosedur penyusunan laporan neraca pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan terutama yangberkaitan dengan prosedur penyusunan laporan neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

b. Bagi Akademis

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai prosedur penyusunan laporan neraca.

c. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan yang berarti bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mengefektifkan penyusunan laporan neraca.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melaksanakan kuliah kerja praktek dengan menggunakan metode Blok Release, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu, serta metode Deskriptif Analitik, yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari dalam instansi pemerintahan yang berhubungan erat dengan penelitian kemudian melakukan analisis. Agar dapat tersusunnya laporan kuliah kerja praktek ini tentunya sangat memerlukan tehnik-tehnik pengumpulan data.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)

1. Pengamatan Langsung (*Observation*)

   Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung prosedur laporan realisasi anggaran dinas sosial Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di bagian akuntansi dan pelaporan.

2. Wawancara (*Interview*)

   Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dibahas.

b. *Library Research* (Studi Pustaka)

Study literature, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek penulis memilih Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Adapun rincian dari lokasi dan waktu kerja praktek, yaitu :

A. Lokasi kerja praktek

Kuliah Kerja Praktek ini dilaksanakan di bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekertariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro No.22 Bandung 40115. Tlp. (022) 4232448-4233347-4230963.

B. Waktu kerja praktek

Waktu pelaksanaan kuliah kerja praktek yaitu selama satu bulan dimulai dari tanggal 28 juni sampai dengan 30 juli 2010. Dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai 15.30 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan Kerja Praktek	Bulan						
		Juni 2010	Juli 2010	Agst 2010	Sept 2010	Okt 2010	Nov 2010	Des 2010
I	Persiapan Kerja Praktek							
	1. Permohonan Ijin Kerja Praktek	■						
	2. Realisasi Ijin K erja Praktek	■						
	3. Penentuan Tempat Kerja Praktek	■						
	4. surat penerimaan dari instansi	■						
II	Pelaksanaan Kerja Praktek							
	1. Aktivitas Kerja Praktek	■	■					
	2. Bimbingan Kerja Praktek dengan		■	■	■	■	■	■
	pembimbing instansi							
III	Pelaporan Kerja Praktek							
	1. Konsultasi Dengan dosen Kerja					■	■	■
	Praktek							
	2. Bimbingan dengan dosen Kerja					■	■	■
	Praktek							
	3. Pembuatan Laporan Kerja Praktek					■	■	■
	4. Ujian Kerja Praktek							■
	5. Final pembuatan laporan							■
	kerja praktek							
	6.Pengumpulan Laporan Kerja Praktek							■